



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Salminita
 NIM : 11575205427
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Analisis Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Di Provinsi Riau

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

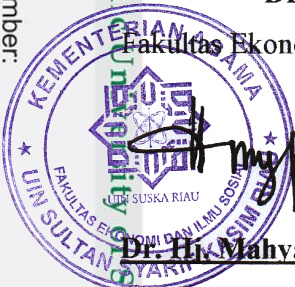
Afrizal, S.Sos, M.Si

NIP. 1969041 200701 1 025

MENGETAHUI :

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hi. Mahvarni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PROGRAM STUDI

Ilmu Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SALMINITA
NIM : 11575205427
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI ILMU DAN SOSIAL
JUDUL : ANALISIS FUNGSI BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) DALAM
 MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH DI PROVINSI RIAU
TANGGAL UJIAN : 17 NOVEMBER 2021


Disetujui Oleh
 KETUA PENGUJI


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.si
 NIP. 19790101 200710 1 003

PENGUJI I


Pivit Septiary Chandra, M.Si
 NIP. 19920925 201903 2 021

PENGUJI II


Irdayanti, S.IP, MA
 NIK. 130 411 030

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 © Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Salminita
 NIM : 11575205427
 Tempat Tgl.Lahir : Lahang Hulu/17 Maret 1996
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Jurusan : Administrasi Negara
 Judul Skripsi :

Analisis Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Di Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 November 2021

Yang membuat pernyataan



Salminita
 NIM: 11575205427

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI RIAU

Oleh:

SALMINITA
NIM. 11575205427

Penelitian ini dilakukan di Bappedalitbang Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi Bappedalitbang dalam melaksanakan penganggaran kegiatan pembangunan daerah di Provinsi Riau. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya usulan program yang disampaikan masyarakat melalui musrenbang yang tidak terealisasi, banyaknya usulan program yang berasal dari pihak yang memiliki kepentingan. Subjek dalam penelitian ini adalah 11 orang, (1) orang Sekretaris Bappedalitbang, (1) orang Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, (1) orang Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan, (1) orang kasubbid Pengendalian dan Evaluasi, (1) orang Kasubbid Data dan Pelaporan, (1) orang Kasubbid Perencanaan Program, (1) orang Kasubbid Umum dan Kepegawaian, (1) orang Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, (1) orang Kasubbid Ekonomi dan Pembangunan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan metode tersebut dapat ditemukan bahwa hasil dari penelitian ini yaitu fungsi Bappedalitbang dalam menyusun perencanaan pembangunan sudah dijalankan. Namun dalam upaya menyusun perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi yang disusun oleh Bappedalitbang masih belum maksimal karena masih banyak usulan program masyarakat yang belum terealisasi di karenakan banyak nya usulan-usulan yang berasal dari pihak yang memiliki kepentingan, dan terbatasnya Sumber Daya Manusia dan kurang efektifnya SDM dalam melakukan penyusunan perencanaan, selain itu juga ditemukan hambatan-hambatan dikarenakan kurangnya Anggaran dan dana sehingga menyebabkan tidak maksimalnya penyusunan perencanaan pembangunan, sehingga melemahkan fungsi Bappedalitbang Provinsi Riau.

Kata Kunci : Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah S.W.T karena atas rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat islam yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Riau”.

Kemudian shalawat dan salam penulis haturkan untuk junjungan alam Baginda Nabi Muhammad S.A.W dengan mengucapkan Allahumma sholli'ala tsaidina Muhammad Wa'ala ali tsayyidina Muhammad, Assalamu'alaika Ya Rasulallah. Yang telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pnetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses pembuatan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang teristimewa kedua orangtua penulis, Ibunda Nurbaiti dan (ALM) Ayahanda Usman, yang telah mencurahkan kasih sayang kepada penulis, selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil. Pengorbanan dan cinta kasih yang ikhlas kepada penulis, semoga Allah membalas dengan perlindungan dan rahmat-Nya kepada kedua orangtua penulis.
2. Bapak Prof. Dr.Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ibu Dr. Hj.Mahyarni, SE., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Kepala Prodi Administrasi Negara yang telah menyetujui judul saya sebelumnya serta memberikan arahan dan masukan bagi penulis.
5. Bapak Afrizal, S.Sos., M.Si selaku Dosen PA dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan ilmunya selama ini.
6. Ibu RATNA DEWI, S.SOS selaku Dosen PA yang telah memberikan arahan dan konsultasi tentang mat mata kuliah dan nilai dan ilmunya selama ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis, serta seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh Pejabat, Pegawai, dan Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis terutama kepada PAIDI, S.Hut., MT telah dengan sabar memberikan keterangan informasi dan data selama penelitian ini.
9. Abang-abang dan Kakak ku tercinta. Umar ST.MT, Rasmal SE,MSi, Tomi SE, Irwansyah SH, Emmy A.Md.Keb.
10. Rekan Kerja Dibappedalitbang Dinas Pariwisata, Bapak Dr.Biryanto Sp Msi,Ibu Ir.Evawani, Ibu Syarifah Aida Rufaida SE, Ibu Khotijatul Zuhorihyah SE, Bapak Waldermarsno SP.MSi, Jamaris Sos, Raiky Pratama ST, Teman – teman Seperjuangan Istikomah, Zana Kobita, Yulianti, Riski Amalia Rosida Anwar Sos, Dan Anisa Flower, Teman - Teman Kelas Ana F 2015, teman-teman organisasi, teman - teman KKN, teman – teman tarbiyah dan halaqah dan tak bisa saya sebutkan satu persatu yang tak bosan-bosannya memberikan support dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian dan skripsi penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, tentu tidak mungkin luput dari kekurangan, baik dari segi bacaan maupun dari segi sistematis penulisan.

Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT meridhai. Amin yarabbal 'alamin.

Wassalamualaikum.Wr. wb

Pekanbaru, 17 November 2021

Penulis

SALMINITA

NIM. 11575205427

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Perencanaan	16
2.1.1 Fungsi Perencanaan.....	17
2.2. Pembangunan	21
2.2.1 Perencanaan Pembangunan.....	22
2.3. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	25
2.4. Faktor Penghambat Perencanaan.....	28
2.5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)	29
2.6. Perencanaan Pembangunan dalam Perspektif Islam	32
2.7. Penelitian Terdahulu.....	35
2.8. Defenisi Konsep	35
2.9. Konsep Operasional.....	37
2.10. Kerangka Berpikir.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	40
3.2. Lokasi dan waktu Penelitian	41
3.3. Jenis dan Sumber data	41
3.4. Teknik Pengumpulan Data	41

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Lokai Penelitian.....	47
----------------------------	----

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2. Visi dan Misi Bappedalitbang Provinsi Riau	47
4.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	49
4.4. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	50
4.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	55
4.6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	56

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Penelitian dan pengembangan (Bappedalitbang) Provinisi Riau	58
5.1.1 Penyusunan Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.....	59
5.2. Kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah	67

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.....	88
6.2. Saran	90

DAFTAR

PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam usaha mewujudkan suatu pembangunan diperlukan upaya untuk mencapai perubahan menuju kearah yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam mewujudkan Pembangunan daerah yang lebih maju diperlukan campur tangan langsung dari pemerintah, agar pelaksanaan pembangunan bisa tercapai berdasarkan tujuan yang diinginkan. Pembangunan disuatu daerah merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Nasional.

Peraturan daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang merata berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya maka pemerintahan mengeluarkan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dalam pasal 23 tentang: Kepala satuan kerja perangkatan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan didaerah propinsi, kabupaten, atau kota adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut kepala BAPPEDA.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) memiliki fungsi sebagai penyusun perencanaan dan pelaksanaan program dibidang perencanaan pembangunan daerah. Jika pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan fungsinya maka pembangunan tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya penanggung

jawaban dari pemerintah. Untuk itu pemerintah perlu menyusun suatu aspek perencanaan dalam melaksanakan pembangunan disuatu daerah. Karena dengan adanya penyusunan rencana pembangunan serta pengendalian, dan pelaksanaan rencana tentunya akan lebih memudahkan pemerintah dalam menyelesaikan tugasnya sebagai penanggung jawab atas pembangunan daerah yang maju.

Proses penyusunan rencana pembangunan merupakan awal dari pelaksanaan kegiatan kerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah. Dimana pemerintah dituntut untuk bisa menilai perkembangan kondisi pembangunan berdasarkan pencapaian hasil kerjanya. Perencanaan pembangunan memiliki tujuan untuk menciptakan program pembangunan yang jelas dan terarah. Jika peran pemerintah terhadap pembanguna tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka program yang sudah direncanakan tidak akan terealisasi.

Rencana pembangunan di Provinsi Riau memerlukan peranan langsung dari berbagai kalangan untuk mendukung keselarasan pembangunan daerah dari segala bidang dalam rangka mencapai tujuan bersama. Salah satu aspek terpenting dalam proses pembuatan keputusan pembangunan yaitu perlu diadakannya penyeleksian sekumpulan kegiatan. Penyeleksian Kegiatan dilakukan dengan cara musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Dikarenakan musrenbang merupakan tempat utama bagi masyarakat untuk mencurahkan keluhannya terhadap rencana pembangunan.

Proses pelaksanaan musrenbang ini merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah agar mempunyai pedoman dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan roda pembangunan. Musrenbang ini dimulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Musrenbang desa merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kerja pembangunan desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Sebelum musrenbang kecamatan dimulai, musrenbang ditingkat desa terlebih dahulu yang harus dilaksanakan. Musrenbang desa dilaksanakan setiap bulan januari dengan mengacu pada RPJM desa . Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP desa. Kemudian barulah dilaksanakan Musrenbang Kecamatan yang akan mengkaji usulan yang di dapat dari setiap desa dikecamatan. Selanjutnya, pada tingkat Kabupaten akan mengevaluasi dan menyerahkan pada BAPPEDALITBANG Provinsi Riau untuk melaksanakan kegiatan dan pengembangan.

Tabel 1.2 Daftar Kabupaten di Provinsi Riau yang Melaksanakan Musrenbang Tahun 2017

No	Kabupaten	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1	Bengkalis	✓	-
2	Indragiri Hilir	✓	-
3	Indragiri Hulu	✓	-
4	Kampar	✓	-
5	Kepulauan Meranti	✓	-
6	Kuantan Singingi	✓	-
7	Pelalawan	✓	-
8	Rokan Hilir	✓	-
9	Rokan Hulu	✓	-
10	Siak	✓	-
11	Dumai	✓	-
12	Pekanbaru	✓	-

(Sumber : Wikipedia)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahap Musrenbang kecamatan ini akan dilakukan suatu musyawarah yang akan dikaji tentang pembangunan apa saja yang akan dibutuhkan dari setiap kecamatan, yang mengarah kepada kepentingan masyarakat yang di dapat dari hasil musrenbang desa sebelumnya. Setelah musrenbang tingkat kecamatam ini dilakukan kemudian akan dilanjutkan dengan musrenbang kabupaten/Kota yang akan membahas hasil musrenbang dari tingkat kecamatan.

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun dari luar desa

Proses penyusunan dokumen RKP Desa dibagi dalam tiga tahapan, tahapan tersebut adalah:

1. Tahap Persiapan Musrenbang Desa

Merupakan Kegiatan Mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data kelapangan bila diperlukan. Analisa data yang dilakukan seringkali disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau “analisis keadaan darurat desa” yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah dan alain sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa

Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis keadaan darurat/kerawanan desa” membahas draft RKP desa menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca musrenbang, dilakukan kegiatan merevisi RKP Desa berdasar masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan surat keputusan (SK) Kepala Desa.

3. Tahap sosialisasi merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

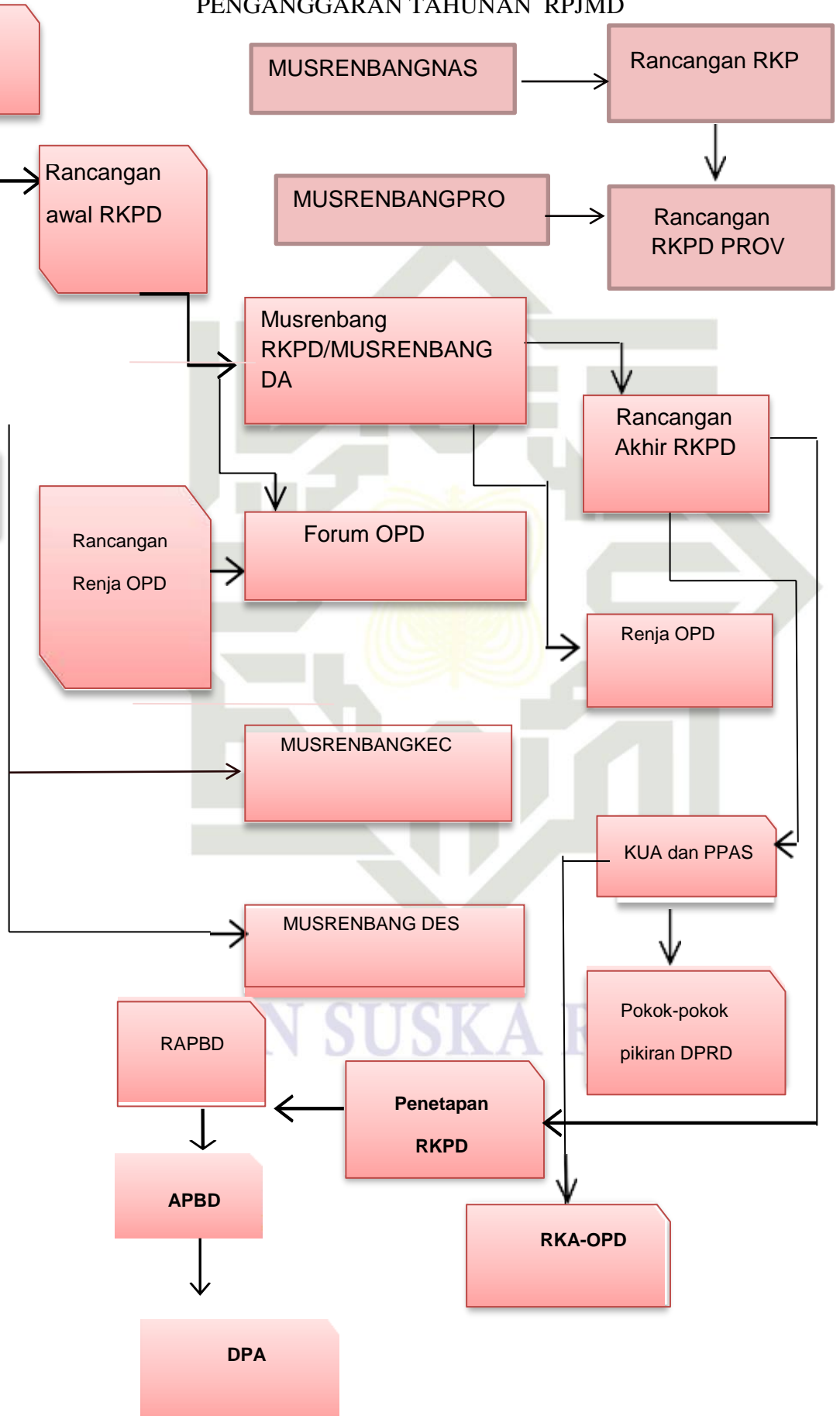
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

MEKANISME PROSES PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN TAHUNAN RPJMD



© H... milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak C...
1. Di...
2. Diar...

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/Lembaga dan lintas kementerian dan lintas kewilayahan serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Musyawarah perencanaan pembangunan atau yang lebih dikenal dengan Musrenbang dilakukann setiap tahun sebelum memasuki tahap anggaran baru. Musrenbang setiap kabuapten Provini Riau diawali dengan musrenbang tingkat desa dan selanjutnya tingkat kecamatan. Pada tahap ini setiap kecamatan musyawrah Perencanaan tingkat kecamatan, yang akan menampung aspirasi masyarakat yang diusulkan dan di akomodir melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing RT/RW/,Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Data usulan dari semua desa/kelurahan yang telah terkumpul, akan di musyawrahkan, hasil musyawarah kecamatan ini dituangkan dalam satu dokumen berupa daftar usulan kegiatan kecamatan yang akan diusulkan pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kabupaten. Pada tahap musrenbang Kabupaten semua aspirsi yang masuk melalui musrenbang kecamatan akan ditampung bersamaan dengan usulan kegiatan dari Organisasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perangkat Daerah (OPD).

Forum ini merupakan pembahasan usulan-usulan yang masuk, dan juga merupakan sarana fasilitas untuk melakukan koordinasi antara kecamatan dengan OPD yang bersangkutan khususnya untuk melakukan sinkronisasi terhadap usulan-usulan kegiatan setiap kecamatan yang akan diakomodir dalam program usulan kegiatan OPD terkait. Usulan kecamatan akan dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis kegiatan OPD yang berwenang untuk mengakomodir usulan tersebut.

Pada tahap ini OPD akan melakukan verifikasi terhadap usulan kecamatan sebelum dituangkan dalam daftar usulan kegiatan OPD. Program/usulan kegiatan yang telah lolos pada tahap verifikasi akan dituangkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD). Rencana kerja OPD merupakan gabungan rencana kerja antara program kerja OPD terkait. Usulan kecamatan dan usulan reses DPRD. Renja yang telah masuk dari semua OPD akan akan diverifikasi sebelum dituangkan dalam rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Usulan yang telah lolos dalam verifikasi tahap ini akan dituangkan dalam rancangan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk kemudian disulkan dan dibahas oleh Eksekutif (Pemerintah Daerah) dengan legislative (DPRD). Hasil pembahasan yang telah disetujui akan disyahkan menjadi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), dengan demikian rencana kerja ini akan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Oleh pemerintah daerah RKPD ini akan dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2015 – 2017

No	Pelaksanaan Musrenbang	Waktu Kegiatan	Usulan
1.	Kabupaten	12 Maret 2015	Pembangunan Desa
2.	Kabupaten	10 Maret 2016	Pembangunan
3.	Kabupaten	9 Maret 2017	Pembangunan dan Pendidikan

(sumber: Data Olahan Penulis tahun 2017)

Dari tabel diatas dapat dilihat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten dilakukan setiap tahun sebelum memasuki anggaran baru. Musrenbang Kabupaten diawali dengan Musrenbang pada tingkat desa dan selanjutnya dilakukan pada tingkat kecamatan. Pada tahap ini masing-masing kecamatan akan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ditingkat kecamatan, yang akan menampung seluruh aspirasi masyarakat yang diusulkan dan diakomodir melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing desa yang bersangkutan.

Usulan ini disusun dan disampaikan secara bertingkat mulai dari level RT atau RW, Desa atau Kelurahan dan Kecamatan. Data usulan dari semua desa atau kelurahan yang telah terkumpul akan disatukan dan dimusyawarahkan. Hasil musyawarah kecamatan ini dituangkan dalam satu dokumen berupa daftar usulan kegiatan kecamatan yang akan diusulkan pada Musrenbang tingkat Kabupaten

Pada tahap Musrenbang Kabupaten semua aspirasi yang masuk melalui Musrenbang kecamatan akan ditampung bersamaan dengan usulan kegiatan dari



setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rencana kerja OPD merupakan gabungan rencana kerja OPD terkait usulan kecamatan dan usulan hasil riset DPRD. Rencana kerja yang telah masuk dari rencana OPD akan diverifikasi sebelum dituangkan dalam rancangan dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Pada tanggal 12 April 2021, penulis MC Prov Riau menyatakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau menggelar Musrenbang Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2022 di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (12/4/2021). Adapun kegiatan ini bertemakan "Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Industri, Pertanian dan Pariwisata Dengan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Yang Prima". Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau, Emri Juli Harnis melaporkan bahwa Musrenbang ini terlaksana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025.

Dijelaskannya bahwa digelarnya kegiatan ini juga bertujuan untuk menginformasikan arah kebijakan prioritas, program prioritas, dan kegiatan strategis pembangunan Provinsi Riau dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2022. Berdasarkan permasalahan pokok daerah serta isu-isu aktual yang berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Riau,.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seharusnya dengan adanya musrenbang masyarakat lebih mudah dalam menyampaikan aspirasinya, akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak usulan program yang berasal dari kelompok penguasa yang lebih didahulukan, dengan membelakangkan usulan dan program dari aspirasi masyarakat. Sehingga usulan – usulan program dari hasil Musrenbang tingkat bawah seperti Desa dan Kecamatan menjadi tidak terealisasi, karena kuatnya intervensi dari pihak lain yang memiliki wewenang lebih tinggi sehingga melemahkan fungsi-fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG). Fenomena intervensi tersebut adalah: Pada saat penyusunan program dan usulan yang telah dari hasil musrenbang, terdapat penyelewengan dari anggota penting daerah yaitu, mereka dengan mudahnya menghapuskan program yang telah diusulkan oleh masyarakat dan diganti dengan usulan yang di ajukan oleh anggota yang memiliki kepentingan sehingga aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tidak terlaksanakan.

Berdasarkan fenomena yang penulis lihat di Bappedalitbang Provinsi Riau ada beberapa masalah yang dalam hal ini akan melemahkan Fungsi Bappedalitbang dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Seharusnya dengan adanya musrenbang masyarakat lebih mudah dalam menyampaikan aspirasinya, akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak usulan program yang berasal dari kelompok penguasa yang lebih didahulukan, dengan membelakangkan usulan dan program dari aspirasi masyarakat.
2. Masih banyak usulan – usulan program dari hasil Musrenbang tingkat bawah, Desa dan Kecamatan yang tidak terlaksana.
3. Kuatnya intervensi dari pihak lain yang memiliki wewenang lebih tinggi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehingga melemahkan fungsi-fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG).

Pemerintahan perlu memfokuskan perhatiannya terhadap masyarakat mengenai keluhan program perencanaan pembangunan pemerintah yang masih belum terwujud hingga sampai saat ini. Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, namun merupakan pekerjaan yang sangat berat dan sulit. Oleh sebab itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki tenaga dan fikiran yang benar-benar mampu mengemban tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu dengan adanya suatu perencanaan yang cukup matang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga apa yang ingin dilaksanakan bisa benar-benar dapat terwujud dengan baik, maka perencanaan pembangunan daerah harus didorong dengan penerapan pembangunan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis.

Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) harus konsisten dan komitmen dalam menjalankan tugasnya, seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga dipengaruhi dengan adanya peran serta masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Melihat masalah yang ada penulis tertarik mengangkat judul penelitian tentang “ *Analisi Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Dalam Menyusun Perencanaan*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan Daerah Di Provinsi Riau ”

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi BAPPEDALITBANG dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Riau
2. Apa saja Hambatan-hambatan BAPPEDALITBANG dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi BAPPEDALITBANG dalam menyusun perencanaan pembangunan di Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Riau.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
 Penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan-perkembangan ilmu sosial dimasa mendatang terutama ilmu Administrasi Negara.
2. Instansi
 Sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan(pemerintah) maupun pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
3. Akademis
 Sebagai tambahan Khasana bagi perpustakaan dan sebagai bahan

informasi bagi akademis yang ingin meneliti masalah yang sama.

14. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, berikut ini penjelasan tentang masing-masing bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KERANGKA TEORITIS

Pada bab ini berisikan penguraian dari teori-teori dan definisi terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metodologi penelitian berupa lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM PENELITIAN

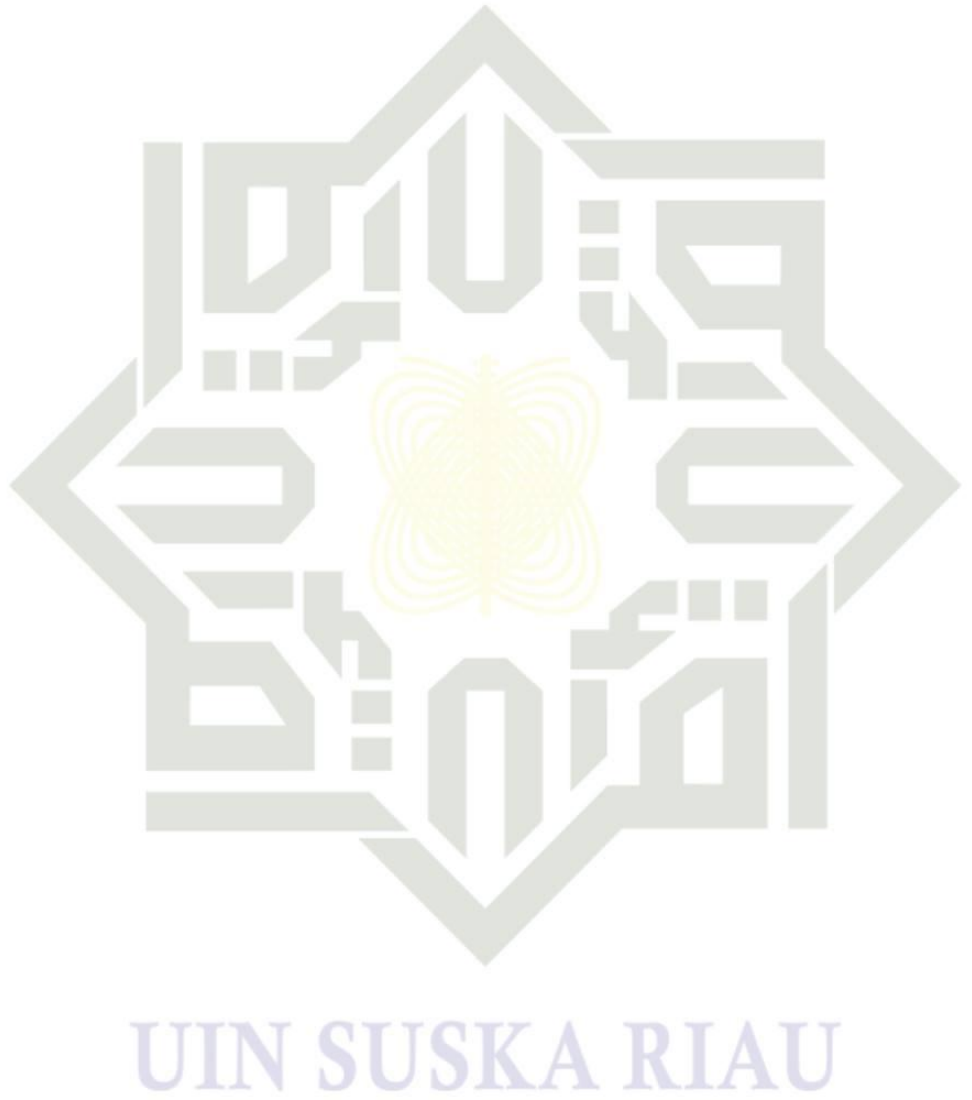
Bab ini berisikan gambaran umum penelitian meliputi sejarah singkat tempat melakukan penelitian, lokasi penelitian, uraian tugas (job description).

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian yang peneliti lakukan.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini peneliti menyajikan kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. (Abe,2005:27)

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi,2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. (Listyangsih,2014:90).

Menurut Terry (dalam Riyadi, 2005 : 3), perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang di

inginkan.

Defenisi perencanaan dapat diartikan hubungan antara apa yang ada sekarang (what is) dengan bagaimana seharusnya (what should be) yang bertalian dengan kebutuhan penentuan tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber. (Uno,2006 :1)

Menurut Hasibuan (dalam Syafie, 2007:49) rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan defenisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik di negara maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang di miliki oleh wilayah tersebut.

Berdasarkan defenisi-defenisi yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumberdaya yang tersedia.

2.1.1. Fungsi Perencanaan

Dalam kamus bahasa Indonesia kata fungsi merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Menurut Sutarto (dalam Nining Haslinda 2008:22) Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan atau pertimbangan lainnya.

Fungsi perencanaan itu merupakan sebagai usaha persiapan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematik tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan ialah perumusan tujuan prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya, didalamnya termasuk ramalan tentang kondisi dimasa akan datang dan perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut. Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan solidaritas nasional dan solidaritas sosial, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab.

Menurut Siagian (2002:36) mengemukakan fungsi perencanaan dapat didefinisikan sebagai Pengambilan keputusan pada masa sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam saat kurun waktu tertentu diwaktu dimasa yang datang

Menurut Handoko, (2003: 23) ada dua fungsi perencanaan :

1. Penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi dan
2. Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Untuk merumuskan sebuah perencanaan pembangunan harus ditentukan langkah-langkah tertentu guna penetapan perencanaan yang baik, yaitu :

1. Identifikasi masalah
2. Analisis situasi
3. Merumuskan yang hendak dicapai
4. Menyusun garis besar semacam proposal
5. Membicarakan proposal yang telah disusun
6. Menetapkan komponen
7. Penentuan tanggungjawab masing-masing komponen
8. Menentukan outline

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Mengadakan kontak antar unit
10. Pengumpulan data terkait
11. Pengolahan data
12. Penyimpulan data
13. Pendiskusian rencana sesuai data
14. Penyusunan naskah pinal
15. Evaluasi naskah rencana
16. Persetujuan naskah rencana
17. Penjabaran untuk pelaksana. (Prajudi dalam Syafie, 2007; 50)

Jadi dalam sebuah kegiatan yang ingin dilakukan, sebelumnya harus direncanakan terlebih dulu karena sebuah perencanaan akan menjadi sebuah patokan dalam melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sebuah tujuan.

Dengan adanya sebuah perencanaan sebuah kegiatan akan berjalan secara struktural yang akan mempermudah tercapainya tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Menurut Siagian (2003: 90-91) proses perencanaan dapat ditinjau dari cirri-ciri suatu rencana yang baik, yakni :

Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi.
2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami teknik-teknik perencanaan.
3. Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perencanaan tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
5. Rencana harus bersifat sederhana dan jelas.
6. Rencana harus luas.
7. Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko tidak ada seorang manusia yang persis tahu apa akan terjadi dimasa depan.
8. Rencana harus bersifat praktis.

Jadi sebuah rencana itu sangat penting sekali dalam sebuah pembangunan karena merupakan sebuah keterampilan penting untuk suatu keberhasilan dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam sebuah perencanaan waktu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perencanaan, dimana terdapat tiga hal penting dalam penggunaan waktu :

1. Waktu sangat diperlukan untuk melaksanakan perencanaan efektif,
2. Waktu sering diperlukan untuk melaksanakan perencanaan tanpa informasi lengkap tentang variable dan alternative, karena waktu diperlukan untuk mendapatkan data dan memperhitungkan semua kemungkinan,
3. Jumlah waktu yang akan dicakupkan dalam rencana harus dipertimbangkan.

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan jangka pendek atau jangka panjang maupun jangka menengah membutuhkan kemampuan jenis- jenis lain dari perencanaan, selain harus memiliki tingkat pengalaman, pengetahuan, dan institusi yang baik, perencanaan perumusan yang sistematis, maka segala upaya

pencapaian tujuan yang dilaksanakan dapat menjadi kurang efisien. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. (UU NO. 25 Tahun 2004, pasal 1).

2.2. Pembangunan

Pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.

Soetomo (2009:166) mengartikan pembangunan masyarakat adalah proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan taraf kehidupan dapat pula diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui proses pembangunan masyarakat. Maka menurut Soetomo dikatakan peningkatan taraf kehidupan dianggap sebagai tujuan maka sebetulnya juga dapat diposisikan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan proses pembangunan masyarakat tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan tentang pengertian pembangunan masyarakat, Soetomo (2009:168) mengatakan pembangunan cenderung dinyatakan cukup membawa hasil apabila mampu untuk mengurangi proporsi jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudjana (2001:265) Pembangunan adalah proses dinamisasi, demokratisasi, dan modernisasi. Proses dinamisasi dimaksud bahwa pembangunan masyarakat adalah kegiatan edukatif untuk membangkitkan praserta masyarakat. Program-Program pembangunan masyarakat akan berhasil dengan baik apabila dapat melibatkan semua potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemajuan masyarakat itu sendiri. Proses modernisasi berarti bahwa pembangunan masyarakat ialah upaya meningkatkan kualitas masyarakat dalam semua aspek kehidupan dengan titik berat pada peningkatan aspek sosial dan ekonomi

Menurut Siagian (2005 : 4), mengatakan bahwa pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara dan pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan pembangunan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu perubahan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

2.2.1. Perencanaan Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan negara. Banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan, namun pemerintahlah yang paling banyak berperan terutama dalam proses perencanaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahannya penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Listyianingsih,2014:92)

Widjojo Nitisastro (2014:92) memperincikan apa yang tercakup dalam perencanaan pembangunan,yaitu:

1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.
2. Pilihan diantara cara-cara alternaif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu kurun waktu sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan senantiasa sebagai suatu lingkaran proses yang tidak berkeputusan.

Perencanaan merujuk kepada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggara pemerintah. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumberdaya yang tersedia. Dengan perencanaan ingin dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan mempengaruhi dan terpengaruh oleh

beberapa banyak dan bagaimana bentuk intervensi dalam suatu perekonomian yang dianggap perlu untuk menjamin tersedianya barang dan jasa.

Sebuah perencanaan pembangunan dilihat dari segi ruang lingkupnya dapat dibedakan atas perencanaan nasional, sektoral dan spasial. Dari segi tingkatan pemerintahan, perencanaan pembangunan dapat berupa perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dilihat dari dimensi waktu, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Suatu perencanaan dilihat dari segi proses dan mekanismenya dapat bersifat *top down* atau *bottom up planning*, dan dapat merupakan gabungan dari kedua mekanisme tersebut.

Perencanaan pembangunan adalah melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan (Listyaningsih, 2014:93).

Sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembanguna
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil

Dari defenisi-defenisi diatas penulis menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang dipilih dan dilakukan secara sadar untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan guna untuk meningkatkan kesejahteraan suatu pembangunan.

2.3. Perencanaan Pembangunan Daerah

Suatu perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Perencanaan Pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membenentuknya, sebagaimana diketahui perencanaan pembangunan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan, dan daerah. Dengan melihat secara divergensi dari setiap unsur tersebut, kemudian diambil sebuah uraiaaan secara konvergensi, akan memebentuk suatu pengertian yang utuh.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Randy R. Whiratnolo, Riant Nugroho D, 2006 : 41), mengatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah dan prioritas pembangunan, pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana.
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel pembangunan dan implikasinya.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.
4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijakan fisik, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah.
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industry, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Jadi dari beberapa unsur pokok perencanaan pembangunan diatas memang harus benar-benar diperhatikan dalam sebuah perencanaan pembangunan kerana hal tersebut merupakan dasar dari perencanaan pembangunan maka sebelum merumuskan perencanaan pembangunan unsur- unsur tersebut harus diperhatikan terlebih dahulu.

Menurut Riyadi dan Deddy (dalam Mhd Asrofi,2005:7) Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan

wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif meliputi berbagai aspek sosial masyarakat dari suatu keadaan yang ada dalam wilayah terkait. Maka untuk menjaga pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dicapai sangat dibutuhkan sekali pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Monitoring dan evaluasi merupakan fungsi manajemen yang saling terkait. Monitoring dalam prakteknya diidentikkan dengan pengawasan, pengendalian, atau pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan yang sedang berjalan, sedangkan evaluasi sering diartikan sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan berjalan.

Menurut Siagian dalam Riyadi (2005 : 263) Pengawasan ialah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan evaluasi didefinisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil yang seharusnya dicapai, dan tujuan pengawasan implementasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan untuk :

1. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
2. Mengetahui apakah unit-unit melaksanakan kegiatan sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi dan perannya masing-masing.

3. Mengetahui apakah ada koordinasi yang dilakukan oleh setiap unit atau instansi atau para pelaksana proyek dengan pihak-pihak terkait.
4. Mencegah dan mengendalikan penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat dihindari.

2.4. Faktor Penghambat dalam Perencanaan

Menurut Riyadi dan Deddy (2005 : 349) Beberapa hal yang sering menjadi kendala dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Keadan politis merupakan kendala yang disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan yang mendompleng pada substansi perencanaan pembangunan.
2. Kondisi Sosial Ekonomi, biasanya mencerminkan kemampuan financial daerah. karena kemampuan financial memiliki peran penting untuk dapat merumuskan perencanaan yang baik.
3. Budaya atau Kultur yang dianut oleh masyarakat. Apabila kultur ini tidak diberdayakan dan diarahkan kearah yang positif secara optimal akan sangat mempengaruhi hasil-hasil perencanaan, bahkan bisa sampai tahap implementasinya

Menurut Todaro, (2000:67) dalam perumusan perencanaan pembangunan bahwa kegagalan proses perencanaan diakibatkan oleh beberapa masalah khusus tertentu, yaitu :



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Keterbatasan penyusunan rencana dan pelaksanaannya.
2. Data-data yang tidak memadai dan tidak handal.
3. Gojolak ekonomi eksternal dan internal yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya.
4. Kelemahan kelembagaan
5. Kurangnya kemauan politik.

2.5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)

Badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan (BAPPEDALITBANG) merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan tugasnya dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan untuk memperbaharui pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yakni pasal 2 nya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bappeda, 1 (satu) orang Sekretaris dan 5 (Lima) orang Kepala Bidang. Adapun tugas pokok dan fungsi

BAPPEDALITBANG Kuantan Singingi adalah:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. penyiapan dan penyusunan KU-APBD, KU-PAPBD, PPAS, dan PPAS Perubahan;
4. penyiapan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. penyiapan dan penyusunan RTRW dan RDTRK;
6. penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
8. pelaksanaan pengukuran IPM;
9. pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerja sama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
10. penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
11. pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya
12. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
13. pelaksanaan kerja sama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
14. pelaksanaan kerja sama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

15. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
16. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan
17. pengkoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan RKPD;
18. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
19. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
20. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
21. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
22. penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;
23. pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
24. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
25. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
26. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;

27. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
28. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
29. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

2.6. Perencanaan Pembangunan dalam Perspektif Islam

Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam kajian Islam, sebelum merencanakan sebuah kegiatan pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal kita juga harus mempunyai sebuah perancaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebungan dengan hal ini sebagaimana dalam firman Allah S.W.T :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Hasyr:18).

Dari penjelasan ayat diatas, bahwa manusia diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, dimana poses kehidupan manusia tidak boleh sama dengan kehidupan yang sebelumnya (kemarin). Di samping itu kata perhatikanlan mengandung makna bahwa manusia

harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok.

Sesungguhnya tanpa kita sadari, dalam diri kita sendiri. Allah S.W.T telah menciptakan kita juga melalui sebuah perencana. Sebagaimana dalam firman Allah S.W.T:

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (١٩)

Artinya:

sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat (dalam kehidupan),(Al-Insyiqaaq : 19)

Yang dimaksud dengan tingkat demi tingkat ialah dari setetes air mani sampai dilahirkan, kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja dan sampai dewasa. Dari hidup menjadi mati kemudian dibangkitkan kembali. Dan Allah-lah maha sempurna dalam perencanan. Firman Allah S.W.T :

(١٦) وَ أَكِيدُ كَيْدًا

Artinya:

Akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya. (Ath-Thaariq: 16)

Dari firman Allah S.W.T di atas jelas Allah adalah maha sempurna dalam segala hal. Jadi Allah yang maha sempurna membuat perencanaan apalagi kita sebagai makhluk ciptaan yang lemah maka perlu sekali untuk merencanakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perbuatan kita, karena nasib kita tergantung pada diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah S.W.T:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (١)

Artinya:

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaga atas perintah ALLAH .Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. (Ar-Ra'd: 11)

Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. Dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut malaikat Hafazhah. [768]. Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, maka keterkaitan dengan penelitian terdahulu ialah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Topik penelitian	Hasil kesimpulan
1	Risky Sembiring	Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Karo	Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan
2	Jembris T Mangar	Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Barat masih menghadapi masalah kurangnya sumber daya manusia yang ada di BAPPEDA sendiri
3	Muhammad Chandra Gustama	Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur	Dalam melaksanakan perannya, Bappeda masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusianya. Belum sebandingnya antara volume atau beban pekerjaan yang ditangani terhadap satuan kerja eselon yang ada

2.8. Defenisi Konsep

Konsep adalah Abstraksi dari fenomena. Di dalam fenomena terdapat definisi-definisi dan konsep-konsep. Arti dari konsep itu sendiri adalah istilah atau pengertian singkat atau abstraksi dari fenomena. (Husni Thamrin, 2008; 52)

Dalam penelitian ini dijelaskan dari masing-masing konsep untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari salah pengertian, maka definisi yang dipakai dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut :

1. Analisis Pelaksanaan Fungsi adalah kajian tentang kerjayang dilaksanakan oleh pegawai dalam melaksanakan fungsi yang diembankan kepadanya. dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau
2. Bappedalitbang adalah badan yang dibentuk oleh kepala daerah yang tugasnya membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian umum tugas dalam bidang perencanaan pembangunan daerah
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Pembangunan adalah upaya proses perubahan yang lebih baik, baik
5. kepentingan masyarakat diselaga bidang, baik kabupaten maupun kota.
6. Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan
7. prinsip-prinsip menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan daerah
8. Perencanaan Pembangunan adalah serangkain kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dimasa akan datang berdasarkan sumber yang ada guna sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
9. Koordinasi merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagi komponen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

11. Evaluasi adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

2.8. Konsep Operasional

Operasional merupakan unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk di analisa dari variable tersebut. Dalam penelitian ini penulis membuat variabel penelitian dengan beberapa indikator. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Analisis Fungsi Bappeda dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan indikator berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan

Tabel 2.1 Operasional Variabel

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Fungsi Bappeda dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (Perda Nomor 5 Tahun 2008)	1. Perumusan Perencanaan pembangunan	a. Kemampuan dalam merencanakan. b. Pengolahan data c. Perencanaan tepat waktu
	2. Pelaksanaan pembangunan	a. Koordinasi. b. Konsultasi perencanaan. c. Pengendalian pembangunan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menilai pelaksanaan pembangunan	a. Monitoring. b. Evaluasi. c. Pencapaian tujuan
4. Pelaksanaan tugas lain	a. Pengamatan lapangan. b. Memantau persiapan perkembangan pelaksanaan perencanaan. c. Pengembangan perencanaan pembangunan

(Sumber: Perda No.5 tahun 2008)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10. Kerangka Berfikir

© Hak

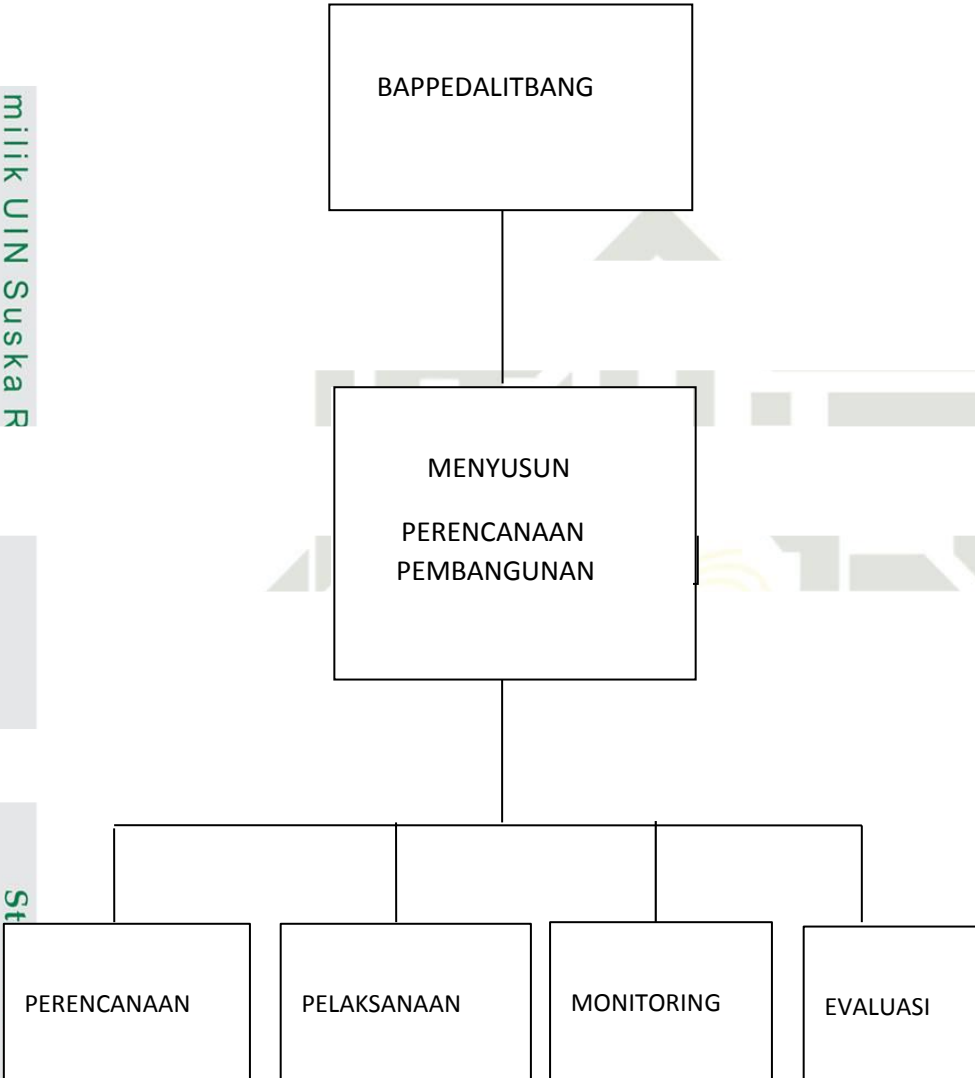
milik UIN Suska R

St

University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis penelitian

Dalam penelitian tentang Analisis Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Riau jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang mana memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai masalah yang di hadapi. Menurut Sugiyono (2005:1) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat suatu kesimpulan yang lebih luas.

Oleh karena itu melalui penelitian ini peneliti ingin memberikan gambaran keadaan yang aktual dengan jalan mengumpulkan data berupa kata-kata, menyusun menganalisis dan menginterpretasikannya. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana Analisis Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Riau

Dalam memperoleh informasi-insformasi yang didapat maka perlu dilakukan pengamatan dan obseravsi langsung di lapangan. Untuk membuktikan kebenaran dan pengamatan maka peneliti harus mengetahui teori apa yang di pakai dalam melakukan penelitian lapangan kenyataan-kenyataan yang di perhatikan.

3.2. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau yang terletak di Jl. Gajah Mada No.200, Simpang Empat, Kota Pekanbaru, Riau 28156 Waktu penelitian dimulai dari Bulan November 2020.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang mana penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi* (Sugiyono,2005:1). Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana Analisis Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Kegiatan Pembangunan Daerah Pada Bappedalitbang Provinsi Riau.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Jadi, data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau yang menggunakannya. (Harbani Pasolong, 2012 : 70), Data primer yang peneliti butuhkan ialah dengan wawancara secara langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan dan staf Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Data yang diperoleh dari atau catatan instansi, atau dari mana saja sudah diolah merupakan data sekunder (Harbani Pasolong, 2012 : 70). Data sekunder yang peneliti peroleh ialah berupa dokumen-dokumen serta data-data yang bisa di analisis mengenai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku artikel-artikel, arsip serta dokumentasi berupa foto-foto sebagai bukti penelitian yang benar. Dan data sekunder ini di peroleh baik melalui internet maupun dokumentasi dan dokumen lainnya secara langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

c. Subjek Penelitian

Pemilihan subjek/informan penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam terkait dengan topik penelitian. Cara menentukan subjek penelitian (*key Informan*) ialah dengan menggunakan Teknik Sampling Bertujuan (*Purposive Sampling*) yaitu suatu penarikan sampel dengan cara sengaja menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi (Harbani Pasolong, 2012 : 107). Dengan demikian penentuan dan pemilihan informan kunci atau *key Informan* hendaknya mengetahui dan memahami terkait topik yang akan diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No	Informan Jabatan	Jabatan
1.	ANDI ISTA TUTIH, S.T., M.Eng.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	PAIDI, S.Hut., MT	Kasubbid. Perencanaan Dan Pendanaan
3.	FUADI, SH.i, M.Si	Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
4.	Dra. GUSTINI	Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Riau
5.	REZI YANDRI	Kasubbid Evaluasi dan Pengendalian Anggaran, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau
6.	SUTRISNO, SH	Kasubbag Kelembagaan Provinsi, Biro Organisasi Setda Provinsi Riau

Sumber Data : Data Peneliti, 2020

d. Kriteria Informan

Berikut terdapat beberapa kriteria dari informan :

Mampu berkomunikasi dengan baik Memberikan jawaban yang mudah dipahami

Memahami dengan permasalahan yang diteliti dan memberikan jawaban yang akurat

Informan yang terlibat langsung dengan bidang yang diteliti

Mudah ditemui dan memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan data yaitu merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian Menurut (Harbani Pasolong, 2012 : 130). Adapun cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan oleh peneliti adalah :

1. Observasi

Observasi merupakan melakukan pengamatan langsung ke objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dengan adanya pedoman observasi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi. Data dan informasi yang diperoleh dari observasi dilakukan dengan memfokuskan pada analisis pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan daerah pada bappedalitbang provinsi riau di Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah kegiatan wawancara antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara di sebut *interviewer*, sedangkan orang yang di wawancarai disebut *Interviewee*. Metode wawancara yang bisa dilakukan yaitu secara langsung (*personal interview*) maupun tidak langsung (*telephone* atau *mail interview*) (Harbani Pasolong, 2012 : 37). Pihak – pihak yang menjadi narasumber pada saat melakukan penelitian adalah Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Daerah, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan dan staf Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarkan kepada pemakai informasi tersebut. Dokumentasi ini berupa data jumlah pegawai, data jumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Profil dan struktur organisasi serta dokumen-dokumen lainnya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau.

f. Teknik analisa data

Untuk mengetahui bagaimana Analisis Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Kegiatan Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau. Peneliti menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan diuraikan beserta masalah atau hambatan – hambatan dalam penyusunan perencanaan anggaran serta mengaitkan dengan teori – teori yang ada.

1. Reduksi Data

Dalam melakukan verifikasi, data harus direduksi agar dapat *dicross-check* kebenarannya. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan apa yang diteliti serta membantu dalam pengumpulan data mengenai bagaimana Analisis Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Riau.

2 Penyajian Data

Setelah direduksi, data kemudian akan ditampilkan (*display*) dalam bentuk yang sudah tersusun sesuai dengan pola hubungan dari *focus* penelitian.

Penyajianya ialah dengan menganalisis secara deskriptif kualitatif, yang mana informasi yang didapat disajikan dalam bentuk teks disesuaikan dengan fakta yang ada tanpa adanya tambahan-tambahan yang tidak sesuai fakta. Hal ini memiliki tujuan agar data yang direduksi diterima dengan baik dan benar sesuai keadaan lapangan. Peneliti berusaha melakukan penelitian yang tepat dan akurat

Analisis Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Riau. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah mereduksi data dan menyajikan data, langkah selanjutnya dilakukan adalah penarikan kesimpulan atau *verification*. Maka dari itu langkah selanjutnya ialah mengaitkan teori-teori serta menarik kesimpulan mengenai Analisis Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Riau

Setelah mereduksi data dan menyajikan data, langkah selanjutnya dilakukan adalah penarikan kesimpulan atau *verification*. Maka dari itu langkah selanjutnya ialah mengaitkan teori-teori serta menarik kesimpulan mengenai Analisis Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Riau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau terletak di Jl. Gajah Mada No.200, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 2815
Telp: (0761) 36032

4.2. VISI dan MISI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau

a. VISI

Dalam rangka mendukung mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2019-2024, yaitu Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU).

a. Berdaya Saing, artinya : Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari.

b. Sejahtera, artinya : Kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.

c. Bermartabat, artinya : Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegras melalui pengalaman nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan

bermasyarakat.

Unggul, artinya : Menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri atas jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

MISI

Adapun misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian visi dengan memperhatikan kondisi tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya;
- b. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing;
- d. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing; dan
- e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi.

Misi pembangunan Provinsi Riau untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau adalah Misi 5 (Kelima) Pemerintah Provinsi Riau, yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi, dengan Tujuan, Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel, sedangkan Sasaran, Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi. Ini merupakan acuan BAPPEDALITBANG dalam merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sesuai tugas dan fungsi dalam bidang perencanaan yang akan mendukung kepada Indikator Kinerja

Utama (IKU) Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Misi Kelima tersebut. Program unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Misi Kelima yang dilaksanakan oleh BAPPEDALITBANG berupa Perencanaan Strategik, diantaranya: (1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; (2) Program Pengembangan Data/Informasi; dan (3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Sedangkan Perencanaan Operasional, diantaranya: (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; (2) Program Peningkatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disiplin Aparatur; dan (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

4.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau, merupakan suatu lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BAPPEDALITBANG Provinsi Riau.

a. Tugas

1. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Terdiri Atas:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - d. Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia.
 - e. Bidang Perekonomian Dan Sumberdaya Alam.
 - f. Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
 - g. Bidang Penelitian Dan Pengembangan Dan
 - h. Kelompok Jabatan Dan Fungsional
2. Sekretariat, Terdiri Atas:
 - a. Subbagian Perencanaan Program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah,
- c. Subbagian Kepegawaian Dan Umum

3. Bidang Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terdiri Atas:

- a. Subbagian Perencanaan Dan Pendanaan
- b. Subbidang Data Dan Informasi Pembangunan Daerah Dan
- c. Subbidang Pengendalian. Evaluasi Dan Pelaporan.

4. Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Terdiri Atas:

- a. Subbidang Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, Dan Transmigrasi.
- b. Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda, Dan
- c. Subbidang Kesehatan Dan Keluarga Berencana

5. Bidang Perekonomian Dan Sumberdaya Alam Terdiri Atas:

- a. Subbidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal Dan Keuangan,
- b. Subbidang Pariwisata
- c. Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan

6. Bidang Infrastruktur Kewilayahan Terdiri Atas:

- a. Subbidang Perhubungan, Energi, Sumberdaya Mineral, Komunikasi, Informatika Statistic, Dan Persandian
- b. Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Dan

c. Subbidang Tataruang Dan Pertahanan

Bidang Penelitian Dan Pengemangan Terdiri Atas:

- a. Subbidang Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
- b. Subbidang Penelitian Dan Pengembangan Perekonomian Dan Suberdaya Alam,Dan
- c. Subbidang Penelitian Dan Pembangunan Infrastruktur Dan Kewilayahan

b Fungsi

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

2. Skretaris

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada subbagian perencanaan program, subbagian keuangan dan perlengkapan subbagian umum.

3 Kepala Bidang Perencanaan,Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang perencanaan dan pendanaan,subbidang data dan informasi pembangunan daerah, dan subbidang pengendalian,evaluasi dan pelaporan.

4 Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia,

Mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat ketenagakerajaan dan

transmigrasi, subbidang pendidikan, budayadan pemuda dan subbidang kesehatan dan keluarga berencana

5. Kepala Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam,
mempunyai tugas melakukan koordinasi,fasilitasi dan evaluasi pada subbidang perdagangan industri, koperasi, penanaman modal dan keuangan, subbidang pariwisata serta subbidang lingkungan hidup, kehutanan pertanian, kelautan dan perikanan.

6. Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan,
Mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang perhubungan, energi, sumberdaya mineral, komunikasi, informatika, statistic dan persandian, subbidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman dan tataruang dan pertanahan.

7. Kepala Bidang Penelitian Dan Pembangunan,
Mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pembangunan manusia, subbidang penelitian dan pengembangan perekonomian dan sumberdaya alam dan subbidang penelitian pengembangan infrastruktur dan kewilayahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasim Riau

b. Rencana Program Dan Kegiatan,Serta Pendanaan

Program adalah instrumen penjabaran kebijakan dan strategi BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau dalam bentuk upaya yang berisi satuatau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk diimplementasikan agar tercapai hasil yang terukur sesuai dengantugas dan fungsi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun program-program yang telah ditetapkan BAPPEDALITBANG untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD, meliputi :

a. Perencanaan Operasional

1. Program Administrasi Perkantoran, dengan jumlah berkisar 14 (empat belas) kegiatan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan jumlah berkisar 8 (delapan) kegiatan.
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan jumlah berkisar 2 (dua) kegiatan.
- b.** Perencanaan Strategik
1. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan jumlah berkisar 7 (tujuh) kegiatan.
 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan jumlah berkisar 31 (tiga puluh satu) kegiatan.
 3. Program Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan dengan jumlah berkisar 7 (tujuh) kegiatan.

1.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, guna meningkatkan fungsi dan kinerja Perangkat Daerah dalam bidang perencanaan, maka diperlukan penentuan isu-isu strategis yang diharapkan menjadi landasan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan. Berdasarkan kondisi permasalahan dan tantangan yang dihadapi 5 (lima) tahun ke depan, maka Perangkat Daerah dihadapkan dengan isu strategis sebagai berikut :

- 1) Tersedianya berbagai regulasi terkait perencanaan dan penganggaran yang dapat menjadi potensi untuk meningkatkan pembangunan daerah.
- 2) Adanya alternatif sumber dana untuk pembangunan daerah yang bersumber dari APBN, SWASTA dan PHLN.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3). Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual dan berkesinambungan serta mudah diakses untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Peningkatan kualitas perencanaan melalui penguatan SDM, perencanaan yang sinergis dan terintegrasi serta pengendalian pelaksanaan pembangunan.

4.6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 mengacu, merencanakan dan melaksanakan untuk mewujudkan pembangunan yang diamanatkan dari Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau BAPPEDALITBANG mempunyai peran dalam mensukseskan pencapaian Misi Kelima Pemerintah Provinsi Riau, yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi, dengan Tujuan, yakni Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel dan Sasaran, yakni Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi. Dalam hal melaksanakan misi tersebut di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Riau dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik dan birokrasi yang sederhana, efisien dan transparan, sehingga BAPPEDALITBANG sebagai institusi yang berfungsi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan perlu menyikapi dan mendalami hal tersebut, sekaligus berperan dalam seluruh proses/siklus manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) dalam menyusun perencanaan pembangunan di Provinsi Riau pada Bab V diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Bappedalitbang berdasarkan penilaian setiap indikator yaitu tentang:

1. Perumusan perencanaan pembangunan dinilai kurang optimalnya SDM dalam menyusun perencanaan pembangunan
2. Pelaksanaan pembangunan dinilai belum terlaksananya pelaksanaan pembangunan dengan baik
3. Menilai pelaksanaan pembangunan dinilai dalam kurangnya kemampuan SDM dalam menilai pelaksanaan pembangunan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati dinilai Bappedalitbang belum mampu memberikan inovasi baru dalam melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Menurut uraian pada Bab V di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi Bappedalitbang Provinsi Riau belum berjalan secara maksimal, yang disebabkan karena SDM nya yang kurang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pembangunan daerah, selain itu kurangnya anggaran juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas Bappedalitbang sehingga menyebabkan kurang optimalnya fungsi Bappedalitbang itu sendiri. Hal ini seperti yang terurai tentang tanggapan

wawancara pada Bab V terhadap fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Riau.

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaan fungsi Bappedalitbang menemui berbagai kendala atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan fungsinya maupun program yang dijalankan, hal ini mengidentifikasi bahwa pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) dalam perencanaan pembangunan Provinsi Riau harus selalu mengevaluasi terhadap pelaksanaan fungsinya terkait dengan kekurangan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, karena Bappedalitbang merupakan unsur yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan daerah.

Berikut ditemukan hambatan-hambatan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan fungsi Bappedalitbang Provinsi Riau diantaranya :

1. Belum tersedianya informasi kajian yang memberikan arah tentang perencanaan. Sebuah perencanaan pembangunan harus didukung oleh informasi kajian tentang sebuah perencanaan pembangunan guna memberikan arah dalam proses perencanaan
2. Terbatasnya kesediaan data dalam perencanaan, data merupakan bahan acuan dasar bagi perencanaan pembangunan daerah
3. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) Bappedalitbang dalam menjalankan fungsi perencanaan SDM merupakan subjek yang sangat penting dalam perencanaan, tanpa adanya sumber daya manusia yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkompeten dalam perencanaan sebuah pembangunan tidak akan terealisasi sebagaimana yang diinginkan

4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, sarana dan perasarana merupakan alat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan
5. Perencanaan yang belum matang. Perencanaan merupakan acuan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan, jadi sebuah perencanaan yang belum matang akan mengakibatkan minimnya tujuan yang akan dicapai. Belum matangnya sebuah perencanaan bisa diakibatkan karena kurangnya data dalam perencanaan

6.2. Saran

Berdasarkan kendala yang ditemukan yang telah diuraikan diatas untuk itu dalam mencapai pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) dalam menyusun perencanaan pembangunan Provinsi Riau yang lebih baik, penulis ingin mencoba memberikan saran yang mungkin berguna dalam rangka meningkatkan prestasi kerja pegawai diantaranya sebagai berikut :

- Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terutama dalam kajian perencanaan.
- Peningkatan dan pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten pada staf Bappedalitbang.
- Pemerintah pusat maupun daerah lebih memperhatikan kondisi Bappedalitbang sebagai sarana pembangunan.
- Peningkatan sarana dan prasarana Bappedalitbang.
- Staf pegawai Bappedalitbang lebih diharapkan putra daerah agar lebih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui perkembangan pembangunan di Provinsi Riau, tidak hanya puas dengan dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya secara baik.

Selalu mencari informasi terhadap perkembangan pembangunan dan belajar dari kesalahan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe,Alexsander.2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri
- Bintoro, Tjokromidjojo, 2003, *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta. Deddy S.B dan Riyadi, Dkk. 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Handoko T. Hani, 2003, *Manajemen*, BAFE, Edisi II, Yogyakarta.
- Juliansyah, Noor . 2011, *Metodologi Penelitian*, Kencana, Jakarta. Michael, P Todaro. 2000, *Pembangunan Ekonomi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Riyadi, Bratakusumah D.S. 2005, *Perencanaan pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Soetomo. 2009, *Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- S.P Siagian. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta.
- Sugiono. 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, ALFABETA, Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007, *Manajemen Pemerintahan*, PT. PERCA, Jakarta. Uno, Hamzah B. 2006, *Perencanaan Pembelajaran*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang *sistem perencanaan pembangunan nasional*
- Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 5 tahun 2008 tentang, *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan pengembangan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara pada tanggal 07 Juni 2021 dengan Staf Bappedalitbang Raiky Pratama ST



Wawancara pada tanggal 07 Juni 2021 dengan Bapak Paldi, S. Hut., MT



Wawancara pada tanggal 07 Juni 2021 Staf Ibu Khotijatul Zuhoriyah SE



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Salminita Lahir di Lahang Hulu, 17 Maret 1996. Merupakan putri terakhir dari Bapak (alm) Usman dan Ibu Nurbaity. Penulis berbangsa Indonesia dan beragama Islam . penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 002 Lahang Hulu pada 2009, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Gaung selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Tambang selesai pada tahun 2015, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi islam negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial dengan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.